

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2019. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Aditya Perdana. *et.al.* 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Aris Prio Agus Santoso. *et.al.* 2022. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Aswanto. 2012. *Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Dian Aries Mujiburohman. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Encik Muhammad Fauzan. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Endrik Safudin. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Setara Press.
- Enrico Simanjuntak. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajlurrahman Jurdi. 2023. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2023. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Gusnawan Suswanto. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Irwansyah. 2020. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- _____. 2020. *Refleksi Hukum Indonesia*. Jakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim. 2010. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Uu Nurul Huda. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Skripsi

- Ahmad Nubli. 2019. *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia*. Skripsi. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Alma Morino. 2019. *Hak Mencalonkan Diri dalam Pemilu Legislatif bagi Mantan Narapidana*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.

Jurnal

- Abdul Waid. 2018. *Meneguhkan Bawaslu Sebagai "Lembaga Peradilan" dalam Bingkai Pengawasan Pemilu*. Jurnal Adhyasta Pemilu. Volume 1 Nomor 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta Pusat.
- Achmad Edi Subiyanto. 2020. *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Volume 17 Nomor 2. Pusat Penelitian dan Pengkajian dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta Pusat.
- Achmad Taufiq, Slamet Suahartono, dan Budiarsih. 2020. *Mantan Narapidana Untuk Ikut Serta dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Yustitia. Volume 21 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Madura. Pamekasan.
- Alif Anandika Putra dan Abdul Kahar Maranjaya. 2023. *Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Jurnal Ganec Swara. Volume 17 Nomor 1. Media Informasi Ilmiah Universitas Mahasaraswati Mataram. Mataram.
- Anajeng Esri Edhi Mahanani. 2021. *Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*. Widya Pranata Hukum. Volume 3 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Yogyakarta.
- Andrizal. 2017. *Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*. Jurnal Hukum Republica. Volume 17 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Pekanbaru.
- cahyo dan Lutfia Harizuandini. 2023. *Urgensi Pengawasan Pencalonan Mantan Narapidana Anggota DPD*. Jurnal Bawaslu DKI Jakarta. Volume 8 Nomor 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.



- Asep Hidayat. 2020. *Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Politicon: Jurnal Ilmu Politik. Volume 2 Nomor 1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Bandung.
- Bakhrul Amal. 2019. *Kewenangan Mengadili oleh Bawaslu atas Sengketa Proses Pemilu yang Diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Volume 48 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Carolene Agatha. et.al. 2023. *Tinjauan Yuridis Terkait Gugatan Nomor 284/G/Tf/2023/PTUN Jakarta Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Dari Perspektif Unsur Keputusan Tata Usaha Negara*. Journal Evidence of Law. Volume 2 Nomor 3. Era Digital Nusantara. Tangerang.
- Firda Arifatuzzahrah dan Irham Bashori Hasba. 2024. *Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jurnal USM Law Review. Volume 7 Nomor 1. Pascasarjana Universitas Semarang. Semarang.
- Firdaus. 2014. *Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Firzhal Arzhi Jiwantara, Karmal Maksudi, dan Azrul Azwar. 2020. *Keputusan Sebagai Norma Penutup dalam Instrumen Hukum Pemerintahan*. Jurnal Education and Development. Volume 8 Nomor 4. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Padangsidimpuan.
- Jou Rapolin Simatupang, Haposan Siallagan, dan Kasman Siburian. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi: Calon Anggota Legislatif Periode 2019-2024)*. Jurnal Hukum Patik. Volume 8 Nomor 1. LPPM Universitas HKBP Nommensen. Medan.
- Khairul Fahmi. 2017. *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*. Jurnal Konstitusi. Volume 14 Nomor 4. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta Pusat.
- Luh Putu Shanti Kusumaningsih. 2017. *Penerimaan Diri dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana*. Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah. Volume 9 Nomor 3. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Y. 2023. *Implementasi Nilai Keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika: Pembelajaran Bagi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024*. Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan. Volume 3 Nomor 2. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia. Lombok Tengah.



- Mhd. Taufiqurrahman dan Bakhrul Khair Amal. 2022. *Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermartabat*. Jurnal Darma Agung. Volume 30 Nomor 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Darma Agung. Medan.
- Muhammad Ja'far. 2018. *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*. Madani Legal Review. Volume 2 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pare-Pare. Pare-Pare.
- Muhammad Syaefudin dan Kadi Sukarna. 2018. *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*. Jurnal USM Law Review. Volume 1 Nomor 2. Magister Hukum Universitas Semarang. Semarang.
- Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata. 2019. *Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik*. Jurnal Konstitusi. Volume 16 Nomor 3. Pusat Penelitian dan Pengkajian dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta Pusat.
- Rosnawati. 2022. *Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Volume 4 Nomor 1. Bagian Hukum Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang.
- Rudi Santoso. 2019. *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas*. Nizham: Jurnal Studi Keislaman. Volume 7 Nomor 2. Pascasarjana Institut Agama ISLAM Negeri Metro. Metro.
- Warih Anjari. 2015. *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Journal Yudisial. Volume 8 Nomor 1. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta Pusat.
- Zainuddin. 2016. *Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Journal Ilmiah Rinjani. Volume 3 Nomor 1. Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani. Lombok Timur.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sumber Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181222143424-32-355726/kpu-coret-oso-dari-daftar-caleg-dpd-pemilu-2019>.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7040781/bawaslu-tolak-gugatan-irman-gusman-yang-dicoret-dari-dct-anggota-dpd?single=1>.

news.detik.com/pemilu/d-7098886/kpu-tak-bisa-jalankan-putusan-ptun-soal-gugatan-irman-gusman-ini-alasannya.

